

## Partisipasi Pemuda Dalam Masyarakat Digital

Judul buku : Young Citizens and Political Participation in a Digital Society, Addressing the Democratic Disconnect  
Penulis : Philippa Collin  
Penerbit : Palgrave McMillan  
ISBN : 978-1-349-46772-3  
Tahun Terbit : Cetakan Pertama, 2015  
Tebal buku : vii + 189 halaman

Buku *Young Citizens and Political Participation in a Digital Society* dipublikasikan Philippa Collin pada 2015. Buku ini bercerita mengenai bagaimana hubungan antara kebijakan pemerintah, partisipasi politik anak muda dan media digital. Dalam buku ini, Collin berusaha membandingkan partisipasi anak muda di Australia dan Inggris. Ia melakukan studi kasus pada anak muda, staf dan pelaksana pada NGO yang menangani anak muda dengan durasi yang lumayan panjang, antara tahun 2007 hingga 2013.

Yang menarik, Collin tidak hanya berusaha menceritakan bagaimana partisipasi politik pemuda, melainkan juga menunjukkan bagaimana kebijakan negara pada dasarnya mendefinisikan kepemudaan itu sendiri. Kebijakan negara juga turut menentukan pada bagaimana cara anak muda berpartisipasi dalam politik. Upaya negara, dalam hal ini Australia dan Inggris, mengelola anak-anak muda, menurut Collin malahan memperburuk *disconnect democracy* atau demokrasi berjarak, dimana artikulasi politik dalam keseharian anak-anak muda mudah diabaikan dan sama sekali tak masuk hitungan.

### Cairnya Makna Pemuda

Buku ini dibuka dengan asumsi bahwa dunia sedang menghadapi krisis demokrasi. Berkurangnya keanggotaan politik dan turunnya jumlah pemilih dalam pemilihan umum di banyak Negara adalah gejala umum krisis demokrasi tersebut. Sejumlah riset, menurut Philippa Collin, pada akhirnya menunjuk partisipasi anak muda sebagai penyumbang krisis demokrasi ini. Dengan kata lain, anak muda dianggap malas berpolitik.

Pemerintah di negara-negara Eropa, Amerika dan Australia, kemudian berusaha mempromosikan partisipasi politik di kalangan pemuda dalam dua decade terakhir (hal.2). Selain krisis demokrasi, pendekatan pembangunan dan juga gerakan hak anak yang sekarang juga dinilai Collin, turut serta membicarakan kepemudaan. Oleh karenanya, Collin tidak hanya membicarakan bagaimana negara mendefinisikan pemuda, tetapi juga menyentuh bagaimana wacana dari organisasi Gerakan Masyarakat Sipil (NGO) turut menentukan pengertian dari pemuda.

Dari perspektif ini, Collin melihat

makna pemuda tidaklah statis, sebagaimana dalam pandangan umum dimana pemuda adalah “mereka yang berada dalam batas usia tertentu”. Makna pemuda menurut Collin, selalu terhubung dengan hal-hal di luar pemuda (struktur sosial, serta proses dan konvensi sosial mengenai kepemudaan) selain terhubung dengan cara bagaimana pemuda mengidentifikasi diri mereka sendiri. Barangkali, dalam terminologi Stuart Hall (2003 hal 25), Collin melihat pemuda dalam perspektif konstruksionis, dimana yang memberi makna pada pemuda adalah sistem bahasa yang digunakan oleh aktor sosial untuk merepresentasikan kepemudaan itu sendiri.

Ketika makna pemuda selalu terhubung –atau tergantung, pada hal-hal di luar pemuda, masalah bagi pemuda dimulai. Hubungan, bagi Collin, berarti juga pemosisian. Dalam berhubungan dengan struktur sosial, dalam hal ini negara, anak muda biasanya diposisikan sebagai ‘yang harus menjadi’ ketimbang ‘hal yang punya kedirian’ (*as becoming rather than being*). Pemuda selalu dianggap membutuhkan perlindungan dari yang lain (hal.6).

Partisipasi politik terkait dengan pendidikan kewarganegaraan (*citizenship*). Pemuda, karena maknanya yang cair, menurut Collin biasanya diposisikan sebagai sebuah produk yang ‘dicitak untuk menjadi warganegara yang baik’ ketimbang ‘diperlakukan sebagai warga negara’. Jadi pemuda selalu diposisikan sebagai orang yang mempunyai kewajiban memahami apa dan mana saja ‘partisipasi yang baik’ untuk negara.

Sementara itu, kewarganegaraan juga bukanlah realitas yang bermakna tunggal, sebagaimana realitas pemuda. Maka, usaha yang paling cocok dalam menjelaskan partisipasi pemuda, menurut

Collin adalah dengan menggambarkan dua hal. *Pertama*, bagaimana ragam mode kewarganegaraan dan bentuk-bentuk identitas politik dalam wacana kepemudaan. *Kedua* menggambarkan bagaimana pemuda sendiri mengidentifikasi dirinya dalam berhadapan dengan bentuk institusional dan non institusional dari politik, organisasi politik dan aksi politik (43).

Masalah cairnya arti pemuda dan warga negara tersebut masih ditambah dengan peran dimensi lain yakni teknologi internet atau media digital dalam politik. Dengan internet, politik kini menjadi semakin termediasi. Mitos bahwa pemuda adalah ‘penduduk asli’ internet, membuat media digital harus turut diperbincangkan dalam membahas kepemudaan. Di Australia dan UK, yang menjadi lokasi penelitian Collin, peran internet sama-sama menjadi perdebatan yang hangat tapi berbeda cara memperlakukannya. Australia memfokuskan internet pada pemahaman kebutuhan warganegara. Tak banyak inisiatif serius menyoal interaksi pembuat kebijakan dan warga negara di Australia. Sementara itu di Inggris, ada lebih banyak engagement antara pembuat kebijakan dengan warga negara, sebab internet/media digital, di Inggris, dipahami sebagai instrumen peningkatan kualitas komunikasi dalam demokrasi (45)

### **Bersama Mencipta ‘Pemuda’**

Kebijakan pemerintah Australia dan Inggris dalam menata pemuda saling berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan pemuda dan perannya dalam negara (partisipasi) dibayangkan secara berbeda dalam kedua pemerintahan negara tersebut. Lembaga non pemerintah di kedua negara juga turut serta menyumbang pembayangan kepemudaan tersebut. Collin membahasnya

di bab 2 dan 3 buku ini.

Narasi kepemudaan dalam pemerintah Australia setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal. *Pertama* wacana pemuda sebagai ‘kelompok kepentingan khusus’; *kedua*, area kebijakan umum (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur); *ketiga*, sistem pemerintahan federal (hal 45-46). Pemerintah nasional Australia sendiri mendefinisikan pemuda sebagai tahap transisi antara anak-anak dengan dewasa (hal 49). Pada tahun 2000-an, pemerintah Liberal Australia merilis kebijakan berjudul “*Footprint to the Future*” yang menghubungkan pemuda dengan ‘kemandirian’ (independence). Independensi sendiri dikonseptualisasi sebagai “*sebuah gradasi, kapasitas yang secara bertahap meningkat untuk judgement dan membuat pilihan*” (-50). Kemajuan pemuda didefinisikan sebagai kesuksesan menjadi dewasa.

Menurut Collin, kepemudaan di Australia, di level nasional, dipahami sebagai kepemudaan yang individualistik. Keragaman dibingkai sebagai hambatan bagi partisipasi. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda, faktor seperti gender, status ‘penduduk asli’ (*indigenous*), diabilitas, pekerjaan, pendidikan, pendapatan keluarga dan kesejahteraan berusaha diidentifikasi. Faktor-faktor itu dianggap berpengaruh dalam kesuksesan pemuda. Anak muda yang diidentifikasi berada ‘dalam resiko’ tidak sukses dalam menjadi dewasa disodori ‘program kepemimpinan’ oleh pemerintah, dan bukan program yang berurusan dengan pengambilan keputusan (hal. 52).

Sementara itu di Inggris, pemuda sudah menjadi topik pemerintahan semenjak tahun 1960an. Inggris meletakkan pemuda sebagai bagian dari

masyarakat. Oleh karenanya partisipasi selalu menjadi topik kepemudaan. Di Inggris, pemuda didefinisikan secara garis besar dengan usia, yakni usia 14 hingga 19 tahun. Menurut teks Departemen Pendidikan dan Keahlian Inggris pada tahun 2006, pemuda didefinisikan sebagai seorang yang mempunyai potensi, menginginkan ‘pemberdayaan’ dan keterlibatan. Pemuda, di Inggris, secara teratur dirujuk sebagai anggota komunitas yang berharga yang menguntungkan komunitas masyarakat, ketika mereka diberdayakan, merasa didukung dan dipercaya untuk membuat keputusan (hal. 61)

Sebab pemerintah Inggris menganggap pemuda sebagai bagian dari komunitas, pemuda dianggap sebagai *stakeholder* yang harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi pemuda dalam konteks ini dibentuk sebagai mekanisme untuk pengembangan sosial anak muda untuk bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan dalam komunitas mereka.

Kebijakan pemerintah ini, menurut Collin memberi konteks pada bagaimana cara kerja NGO atau organisasi dalam komunitas menginterpretasi pemuda (70). Di Australia, Collin meneliti dua buah organisasi komunitas yakni *Reachout.com* milik *Inspire Foundation* dan *Foundation for Young Australian* (FYA). Sementara di Inggris, Collin meneliti *British Youth Council* dan *UK Youth*. Menurut Collin, umumnya organisasi ini memposisikan diri mereka sebagai lembaga masyarakat sipil yang bekerja untuk kepentingan anak muda yang, dalam banyak ruang publik dan proses politik, dipinggirkan (93). Mereka cenderung melawan wacana dominan pemerintah dalam bidang kepemudaan.

Dengan demikian, makna pemuda versi pemerintah dan lembaga masyarakat sipil berbeda dan saling berkontestasi. Masalahnya kemudian bagaimana pemuda memosisikan diri sekaligus membangun identitasnya dalam partisipasi politik?

### **Pemuda dan Digitalisasi Politik**

Menurut Collin pemuda di Australia dan Inggris selalu berpikir partisipasi dalam konteks 'isu' ketimbang institusi atau prosesnya. Maksudnya, para pemuda berpartisipasi hanya dalam isu yang menjadi pilihan mereka ketimbang berpartisipasi sebagai bagian dari negara (menjadi warga negara). Para pemuda ini memilih berpartisipasi pada hal yang lebih personal dengan struktur yang non-hierarkis. Mereka merasa lebih bebas dan dengan demikian dapat mengintegrasikan tindakan partisipasi dengan gaya hidup mereka.

Jadi, bagi para pemuda ini, tujuan personal adalah 'tindakan politis'. Tujuan personal selalu tergambar dalam cara bagaimana pemuda mengkonseptualisasi partisipasi. Pada faktanya, menurut Collin, anak muda mungkin dapat termotivasi dengan beragam tujuan yang dibingkai dengan fokus tindakan pada isu yang khusus; jumpa dengan orang baru, meluaskan hubungan dan mencari pengalaman untuk masa depan (125)

Yang absen dari pembicaraan mengenai partisipasi politik adalah rujukan ideologis atau filosofis. Menurut Collin, dalam wawancara yang ia lakukan pada sejumlah narasumber pemuda di Australia dan Inggris, hanya sedikit dari pemuda yang mampu membedakan antara kandidat, ideologi dan platform politik. Jikapun mereka membicarakan politik, maka apa yang mereka bicarakan merujuk pada konteks sebuah isu, atau seringkali malah

berkenaan dengan sebuah proyek tertentu (111).

Studi partisipasi seringkali menganggap pencarian informasi sebagai bentuk minimal dari partisipasi. Menurut Collin, ketika pemuda memosisikan partisipasi politik sebagai hal yang lebih personal, maka fungsi pencarian informasi dengan internet menjadi bentuk partisipasi yang lebih elaboratif ketimbang yang lain. Pencarian informasi dengan menggunakan media digital, adalah proses pemuda mempelajari isu dan peluang, cara pemuda menghubungkan diri dengan jaringan lain, membangun ketertarikan dan hubungan dengan isu.

Partisipasi menurut Stevie, seorang narasumber Collin di Australia yang berusia 22 tahun, salah satunya adalah turut serta mengetahui isu kesehatan jiwa. Stevie mengetahui isu ini melalui situs ReachOut. Dari situs ini, Stevie kemudian dapat terhubung kepada sumber informasi lain dan organisasi lain (hal. 137). Hal ini berarti pencarian informasi membantu pemuda untuk mengatasi hambatan partisipasi. Ragam isu yang menarik seorang pemuda, merefleksikan keragaman media internet yang ia gunakan untuk mencari informasi. Termasuk dalam hal ini adalah keragaman situs, platform, alat (*devices*) dan perilaku dari pencarian informasi dan peluang partisipasi melalui tindakan.

Uniknya, para pemuda lebih sering menggunakan mesin pencari (Google), situs berita, situs dengan informasi spesifik (palang merah), situs kebudayaan (band, komunitas), dan social media (Myspace, Facebook, Twitter) ketimbang situs resmi pemerintah. Sementara situs-situs milik organisasi masyarakat sipil tidak digunakan para pemuda untuk mendefinisikan isu tetapi hanya alat untuk menghubungkan diri mereka dengan organisasi lain, kampanye,

serta komunitas lain. Lebih jauh, situs atau akun media sosial pemerintah biasanya dipandang secara sinis oleh pemuda. Para pemuda, menurut Collin sadar bahwa pemerintah membuat situs atau akun media sosial untuk meraih anak muda. Namun mereka berpendapat bahwa mereka beranjangsana melalui MySpace dan Facebook untuk berhubungan dengan komunitas mereka, dan bukan untuk berjumpa dengan pemerintah.

Pemuda di Inggris, secara umum mengira bahwa politisi dan pemerintah akan lebih melihat kampanye sosial media ketimbang protes jalanan. Sementara itu anak muda Australia merasa bahwa elit politik mengabaikan bentuk komunikasi dan partisipasi online para pemuda. Komunikasi dan Partisipasi online anak muda tersebut hanya dianggap sebagai ‘aktivitas klik’ (*Clicktivism*) atau aspirasi yang tidak merepresentasikan pemuda keseluruhan. Pada saat yang sama, pemerintah, politisi, partai politik berusaha menjangkau pemuda dengan internet. Collin melihat hal ini bermakna bahwa media digital tidak menyediakan kuasa apapun bagi pemuda untuk mempengaruhi institusi dan elit politik (147).

### **Pemuda dan Demokrasi Berjarak**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keinginan pemerintah menata masalah kepemudaan berawal dari hasrat untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam demokrasi. Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Collin di Australia dan Inggris, usaha itu hanya memperburuk pemerintah di mata pemuda.

Kebijakan partisipasi direproduksi pemerintah sebagai kebijakan yang dipimpin oleh orang dewasa, hierarkis dan elitis. Ketika menanggapi pemuda, pemerintah gagal mengganti perspektif dari

‘masyarakat berbasis keanggotaan’ (*membership-based society*) ke ‘masyarakat berbasis jaringan’ (*network-based society*). Pemerintah biasanya memaksa pemuda untuk sebagai ‘anggota masyarakat’ yang dibebani tugas tertentu. Sebagai responsnya, anak muda terus mencari ruang-ruang dimana mereka dapat berdialog dan berdiskusi –dan bukan ruang yang disediakan pemerintah. Ketika para pemuda mengkomunikasikan gagasannya dalam ruang yang mereka inginkan, pada dasarnya mereka meminta pemerintah untuk mendengar dan memahami pandangan mereka. Inilah yang dimaksud dengan *disconnect democracy*, dimana ada selalu jarak antara konsep partisipasi yang diinginkan pemerintah dan pemuda.

Di bab akhir buku ini, bab 6, Collin juga menyediakan beberapa rekomendasi yang perlu ditempuh untuk mengurangi demokrasi berjarak tersebut. Misalnya, kerangka kerja kebijakan pemerintah haruslah lebih komprehensif membuat pemerintah, otoritas dan masyarakat dapat memahami dan merespons kebutuhan dan cara pandang anak muda, dan bukan malah merumuskan apa yang harus dilakukan pemuda. Ketika bersentuhan dengan masalah pemuda, kebijakan-kebijakan partisipasi haruslah memiliki pluralism dan multiplisitas termasuk menyediakan tempat bagi kepemudaan; bersifat ‘*fun*’ dan individual, yang ditujukan pada pengembangan diri dan kondisi sosial yang lebih baik.

Rekomendasi Collin, menurut saya –sebagaimana rekomendasi pada umumnya, masih bersifat abstrak. Akan tetapi, menurut saya, pembaca di Indonesia semestinya tidak terlalu terpicat pada hasil penelitian Collin yang sangat terikat konteks lokasi penelitiannya, Inggris dan Australia. Artinya, hasil penelitian tersebut

bisa jadi berbeda dengan ruang Indonesia. Pembaca Indonesia semestinya terpicu pada kerangka kerja riset kepemudaan yang dilakukan Collin. Collin menelusur tiga aktor penting dalam mendefinisikan kepemudaan (pemerintah, lembaga publik/lembaga masyarakat sipil, serta pemuda itu sendiri) serta pada bagaimana media digital digunakan dalam hubungan ketiga aktor tersebut.

Siapa tahu, setelah membaca buku ini, seseorang tertarik mencoba mencari tahu bagaimana posisi pemuda dalam pernyataan Panji Pragiwaksono, seorang selebritis Indonesia yang belakangan senang bicara soal kepemudaan, bahwa "...Hanya ada dua anak muda di dunia. Mereka yang menuntut perubahan. Mereka yang menciptakan perubahan...". Apakah pernyataan itu innocent, atau berusaha mengarahkan pemuda menjadi 'warga negara yang baik'? []

### **Rujukan**

Hall, S. (2003). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. London: Sage Publications.